

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sebagai bentuk penunjang penelitian selanjutnya yang digunakan peneliti sebagai referensi penelitian yang sudah ada atau sebelumnya digunakan sebagai bahan perbandingan dalam menganalisis suatu fenomena dan keabsahan data. Penelitian terdahulu digunakan peneliti sebagai acuan dan referensi yang memiliki tema permasalahan yang berkaitan dengan judul peneliti sehingga dapat menemukan sebuah relevansi. Penelitian terdahulu berguna sebagai pembanding penelitian yang akan dikaji dan dibahas, bentuk penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan penelitian sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti Judul	Hasil Temuan penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Gerakan Literasi di Taman Baca Masyarakat Pondok Sinau Lentera Anak Nusantara. Penulis: (Agustino 2019) No Jurnal : Jurnal Sospol, Vol 5 No 1 (Januari-Juni 2019), Hlm 142-164	TBM Pondok Sinau Lentera Anak Nusantara berada di Dusun Pepen RT 04 RW 03 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur yang telah mendapatkan sertifikat Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dengan Nomor:	Persamaan: meneliti mengenai pemberdayaan masyarakat berbasis literasi dengan produk TBM (Taman Baca Masyarakat) Perbedaan: Fokus utama dari kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis gerakan literasi di TBM di Pondok Sinau Lentera Anak Nusantara adalah transformasi nilai-nilai karakter (character

		<p>800/II/35.07.101/2017 tanggal 15 Agustus 2017. Pemberdayaan masyarakat berbasis gerakan literasi di TBM Pondok Sinau Lentera Anak Nusantara dilakukan berdasarkan pada perspektif historis dan sosiologis. TBM Pondok Sinau Lentera Anak Nusantara berada di Dusun Pepen RT 04 RW 03 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur yang telah mendapatkan sertifikat Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dengan Nomor: 800/II/35.07.101/2017 tanggal 15 Agustus 2017. Pemberdayaan masyarakat berbasis gerakan literasi di TBM Pondok Sinau Lentera Anak Nusantara dilakukan berdasarkan</p>	<p>building) utamanya bagi kelompok usia produktif serta mendorong tersemainya kemandirian sosial-ekonomi berbasis pada rangkaian kegiatan soft skill tematik.</p>
--	--	---	--

		pada perspektif historis dan sosiologis.	
2.	<p>Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Literasi Perdesaan di Desa Cimanggu Kabupaten Bandung Barat</p> <p>Penulis : (Herdiana, Heriyana, and Suhaerawan 2019) Masyarakat, 2019, Vol. 4 No. 4</p>	<p>Gerakan literasi perdesaan harus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, terutama dari pemerintah desa. Hal ini dikarenakan pemerintah desa sebagai pemegang kewenangan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Salah satu wujudnya dapat berupa pemberian dukungan kepada gerakan literasi perdesaan yang tidak hanya ditujukan kepada kebijakan pembangunan infrastruktur literasi perdesaan tetapi juga dukungan dalam menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam gerakan literasi perdesaan tersebut.</p>	<p>Persamaan: meneliti mengenai pemberdayaan pada masyarakat melalui Gerakan literasi</p> <p>Perbedaan : peneliti ini berfokus Gerakan literasi Pendidikan pada anak-anak di sekolah.</p>
3.	<p>Pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengembangan literasi pada</p>	<p>Literasi pada anak-anak dapat dikembangkan dengan</p>	<p>Persamaan: meneliti mengenai pemberdayaan masyarakat melalui literasi berdampak kepada</p>

	<p>anak-anak di Dusun Jaten Triharjo Pandak Bantul</p> <p>Penulis: (Maulana and Prasetyo 2019) Vol. 3, No. 2, A</p>	<p>menggunakan metode dan media yang menarik. Salah satunya yaitu mendirikan aman bacaan dan melaksanakan berbagai lomba yang dapat mengasah kreatifitasnya dalam membaca dan menulis. Anak-anak sangat senang sekali saat membaca dan mereka juga sangat antusias saat mengikuti lomba-lomba tersebut.</p>	<p>perilaku masyarakat desa.</p> <p>Perbedaan : peneliti ini sosialisasikan pemahaman mengenai Gerakan Literasi Sekolah yang terkait dengan pengertian Gerakan Literasi Sekolah yaitu program yang menyangkut pembiasaan membaca, berwawasan luas dan berkreasi.</p>
4.	<p>Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Rumah Literasi Kreatif di Kabupaten Kutai Karta negara</p> <p>Penulis : (Dana Pratama et al. 2021)</p>	<p>Untuk menunjang keberlanjutan melekat literasi masyarakat di Desa Beringin Agung, Rullika Bunga Kertasturut membuat inisiatif kemandirian ekonomi di sebagian besar jenis literasi yang dikembangkan. Pada bidang literasi kebudayaan dan kewarganegaraan, upaya pemberdayaan masyarakat yang</p>	<p>Persamaan : meneliti mengenai pemberdayaan masyarakat berbasis literasi.</p> <p>Perbedaan : peneliti ini berfokus pada membangun ekonomi berbasis literasi masyarakat di sekitar PT Pertamina.</p>

		<p>dilakukan adalah dengan pemantapan seni tari Rulika Bunga Kertas dengan menggandeng kesenian lokal dan membentuk subdivisi yang menaunginya. Pada bidang literasi sains, penerapan praktis aquaponik telah diterapkan. Pada bidang literasi digital, Rulika Bunga Kertas telah mengimplementasikan pembuatan sosial media untuk promosi lembaga, kegiatan, dan hasil produksi di dalamnya. Selain itu, pelatihan fotografi dan videografi terdistribusikan kepada generasi muda. Pada bidang literasi numerasi dan finansial, terbentuk kelompok pemberdayaan Mamuja yang rutin memproduksi produk bernilai jual.</p> <p>Rulika Bunga Kertas turut</p>	
--	--	---	--

		mempromosikan baik melalui media sosial.	
5.	Upaya Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Ar-Rasyid dalam Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Literasi Penulis: (PLANO DE DISCIPLINA - PROF LEONARDO - POLÍTICAS PÚBLICAS 2019) LIBRIA, Vol. 11, No. 1, Juni 2019	Taman bacaan masyarakat pertama yang didirikan pemerintah di tahun 1990 di fokuskan untuk meningkatkan angka aksesi rawan di desa-desa dan sebagian besar adalah perpanjangan tangan dari program penghapusan buta huruf pemerintah.	Persamaan : meneliti mengenai pemberdayaan masyarakat berbasis literasi dengan produk TBM (Taman Baca Masyarakat) Perbedaan : peneliti ini mencakup semua literasi seperti literasi digital, finansial, dan Kesehatan.

2.2 Tinjauan Pustaka

2.2.1 Peranan

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi. Sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (role occupant). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memegang suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang

menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.² Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan peranan.

2.2.2 Literasi

Dalam beberapa dekade terakhir, istilah literasi (literacy) tampak begitu populer. Istilah tersebut berasal dari Bahasa Latin yakni literatus yang berarti a learned person (orang yang belajar) atau littera (huruf) yang artinya melibatkan penguasaan berbagai sistem tulisan serta konvensi yang menyertai. Pada hakikatnya, konsepsi literasi terus mengalami elaborasi, sehingga tidak hanya berhubungan dengan keaksaraandan bahasa,, tetapi sudah merambah pada fungsi keterampilan hidup (life skills) bahkan literasi moral (moral literacy).

Konsep literasi sebagai memahami dan memahamkan melahirkan istilah literasi produktif dan literasi-reseptif. Konsep ini merujuk pada upaya memahami melalui aktivitas berbahasa pasif (membaca, menyimak), dan upaya memahamkan melalui aktivitas berbahasa aktif (menulis, berbicara). Dengan demikian literasi produktif dibatasi maknanya sebagai proses transfer informasi melalui keterampilan menulis yang mampu memahamkan melalui pemanfaatan teknologi (Agustin Sri, 2017). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah literasi berasal dari kata literer yang berkaitan dengan tradisi tulis. Berbagai penelitian yang memandang literasi sebagai praktik sosial termasuk dalam bidang kajian baru yang disebut New Literacy Studies (NLS)

Dalam sebuah laporan UNESCO, Bulgaria, Kolombia, dan Meksiko misalnya, mendefinisikan literasi sebagai kemampuan untuk membaca dan menulis teks kalimat sederhana. Sementara Ukraina, Malaysia, dan Hungaria mengaitkan literasi dengan tingkat pendidikan. Ada juga negara-negara yang membangun pengertian literasi secara lebih spesifik. Cina misalnya, mendefinisikan literasi sebagai kemampuan seseorang untuk mengerti minimum 2.000 aksara Cina di wilayah perkotaan dan 1.500 karakter di wilayah perdesaan. Dalam konteks tersebut, maka menjadi hal yang wajar jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada dua tahun lalu menyumbangkan sedikitnya 2.500 buku yang terdiri dari 167 judul buku tentang anti korupsi ke Forum Taman Baca Masyarakat (TBM) sebagai salah satu upaya pengenalan anti korupsi lewat literasi (Rifa'i, 2017). Walaupun negara maju seperti Singapura masih mendefinisikan literasi sebagai kemampuan untuk membaca dan memahami bacaan dalam bahasa yang spesifik (Efendi, 2017).

Beberapa konsep yang sering digunakan antara lain literacy event (peristiwa literasi) dan literacy practices (praktik literasi). (Dewayani Sofie, 2017) dengan mengutip Shirley Heath (1983) bahwa dalam kajian tentang literasi di dalam tiga komunitas negara bagian South Carolina telah mendefinisikan peristiwa literasi sebagai apapun dimana sebuah bentuk tulisan atau teks menjadi bagian dari interaksi para partisipan dan proses pemaknaan teks tersebut. Secara sederhana, istilah peristiwa literasi bisa dimaknai sebagai peristiwa atau kejadian yang dapat diamati dan di dalamnya terlahir produk tertulis.

Sementara itu, praktik literasi tidak hanya mencakup peristiwa yang bisa dilihat tersebut, namun juga nilai-nilai dan perilaku dari orang-orang yang terlibat dalam praktik literasi tersebut. Secara ontologis konsep literasi dapat dibedakan ke dalam beberapa kategori, yakni: (1) Literasi dasar (basic literacy) berhubungan dengan kemampuan mendengar, berbicara, membaca, menulis dan berhitung; (2) Literasi Perpustakaan (Library Literacy) yang terkait dengan penyampaian pemahaman untuk membedakan bahan bacaan yang bersifat

fiksi dan nonfiksi, untuk memahami pemanfaatan katalog serta aplikasi kodifikasi koleksi; (3) Literasi Media (Media Literacy) yang berhubungan dengan pemahaman substansi sampai framing media massa; (4) Literasi Teknologi (Technology Literacy) yang berhubungan dengan kemampuan memahami eksistensi dan nilai kemanfaatan perangkat teknologi; serta (4) Literasi Visual (Visual Literacy) yang berhubungan dengan pemahaman lanjutan antara unsur literasi media dan literasi teknologi.

Persepektif ontologis tersebut, terlihat bahwa tafsir bahkan makna operasional literasi telah mengalami perkembangan sangat signifikan. Literasi tidak berhenti hanya pada kegiatan membaca yang membosankan untuk beberapa orang, tetapi telah berkembang menjadi pemahaman yang lebih kontekstual. Mulai yang terkait dengan kegiatan pencerdasan sisi kognitif (common sense), pencerahan sisi afektif (rasa) serta dapat direfleksikan dalam tindakan empirik (psikomotorik). Walaupun, membaca merupakan salah satu langkah yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya proses belajar mengajar (Faradina, 2017).

Maka, aktivitas literasi yang kalah masif jika dibandingkan dengan adopsi teknologi, membuat kehidupan manusia penuh dengan masalah (trouble maker). Kemampuan literasi yang rendah tentunya merupakan suatu hal yang dapat berpotensi menimbulkan dan memperkeruh konflik yang terjadi di masyarakat. Contoh yang paling nyata tampak dari begitu mudahnya sebagian masyarakat menyebarkan informasi tanpa berfikir kritis dan melakukan pengecekan sumber darimana dan untuk apa informasi itu muncul. Fenomena banyak bersebarannya informasi yang ada di masyarakat dalam beberapa tahun terakhir adalah gambaran singkat efek dari lemahnya kemampuan literasi sebagian besar masyarakat (Agustino, 2018). Berangkat dari fenomena tersebut, suatu upaya untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya mempunyai kemampuan literasi yang baik muncul dalam bentuk gerakan literasi.

Secara umum gerakan literasi sering dipahami sebagai suatu usaha atau kegiatan yang bersifat partisipatif dengan seluruh masyarakat untuk berproses dalam meningkatkan kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui aktivitas membaca, melihat, menyimak, menulis, dan berbicara. Jika dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat, gerakan literasi ini merupakan salah satu cara untuk mengatasi berbagai tantangan yang terdapat didalamnya yang meliputi kegagapan dalam menyikapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, keengganan menerima hal-hal baru, hingga kurangnya keinginan dari banyak individu untuk terus berproses menjadi lebih baik. Nilai-nilai kesukarelawanan (volutarism) menjadi kunci kekuatan gerakan literasi berbasis komunitas.

Sebagaimana hasil penelitian (Yanto Andri, 2016) bahwa aktivitas gerakan literasi sangat bergantung pada aktivitas yang dibuat oleh Sudut Baca Soreang (SBS) dengan dukungan relawan yang ada. Seluruh kegiatan SBS telah tersusun dan terencana mulai dari kegiatan mingguan, bulanan dan tahunan dengan sasaran pemuda, pelajar, perempuan dan UMKM. Hal tersebut tentu berbeda motif dengan aktivitas pemberdayaan masyarakat berbasis isu-isu yang lebih bersifat profit oriented seperti pariwisata. Karena target utama yang ingin dicapai hanya semata-mata peningkatan pendapatan (Harun, 2014). Walaupun, proses pemberdayaan masyarakat berbasis ekowisata sebagai salah satu contoh, tetap melibatkan peran aktif masyarakat sebagaimana yang berbasis pada gerakan literasi, mulai dari kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian agar tetap menghormati nilai-nilai sosial dan keagamaan di sekitar kawasan wisata (Ridlwan Muhammad Ama, 2017).

2.2.3. Masyarakat Desa

Masyarakat pedesaan pada hakikatnya bersifat *gradual*. Masyarakat pedesaan mempunyai hubungan yang lebih mendalam dan erat dibandingkan dengan masyarakat kota lainnya. Masyarakat pedesaan mempunyai sistem kehidupan yang berkelompok atas dasar sistem kekeluargaan. Penduduk desa pada umumnya hidup dari pertanian, ada juga sebagai

tukang kayu, pembuat genteng dan pembuat bata, tukang bangunan, akan tetapi inti pekerjaan masyarakat desa adalah pertanian. Masyarakat desa menurut Max Weber sebagai struktur atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya. Emile Durkheim mendefinisikan masyarakat desa sebagai kenyataan objektif individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Kehidupan sebuah masyarakat merupakan sebuah sistem sosial di mana bagian-bagian yang ada di dalamnya saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dan menjadikan bagian-bagian tersebut menjadi suatu kesatuan yang terpadu. Manusia akan bertemu dengan manusia lainnya dalam sebuah masyarakat dengan peran yang berbeda-beda, sebagai contoh ketika seseorang melakukan perjalanan wisata, pasti kita akan bertemu dengan sebuah sistem wisata antara lain biro wisata, pengelola wisata, pendamping perjalanan wisata, rumah makan, penginapan dan lain-lain. (Luthfia 2013)

Masyarakat ditandai dengan ciri-ciri yaitu adanya pola interaksi dan adanya rasa identitas terhadap kelompok, dimana individu yang bersangkutan menjadi anggota kelompoknya. Sedangkan Soerjono Soekanto menyatakan bahwa sebagai suatu pergaulan hidup atau suatu bentuk kehidupan bersama manusia, maka masyarakat itu mempunyai ciri-ciri pokok sebagai berikut :

a. Manusia yang hidup bersama. Di dalam ilmu sosial tak ada ukuran yang mutlak ataupun angka yang pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada. Akan tetapi, secara teoritis angka minimumnya ada dua orang yang hidup bersama.

b. Bercampur untuk wilayah yang cukup lama. Kumpulan dari manusia tidaklah sama dengan kumpulan benda-benda mati, seperti kursi, meja dan sebagainya, karena berkumpulnya manusia akan timbul manusia-manusia baru. Manusia itu juga dapat bercakap-cakap, kesan-kesan atau perasaan-perasaannya. Sebagai akibat hidup bersama itu timbulah sistem komunikasi

dan timbulah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kelompok tersebut.

c. Mereka sadar merupakan sebuah kesatuan.

d. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan, oleh karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya.

Ciri-ciri masyarakat diatas selaras dengan definisi masyarakat yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan yang sama. Masyarakat itu meliputi pengelompokan-pengelompokan yang lebih kecil yang mempunyai hubungan yang erat satu sama lain. Masyarakat desa erat kaitannya dengan bidang pertanian, sebab mayoritas pedesaan di negara kita masih bergantung pada bidang pertanian. Sayangnya, masyarakat desa yang terkenal sebagai penghasil pangan justru terkenal pula akan kemiskinannya. Desa, pertanian dan kemiskinan sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat tani. Masyarakat tani adalah mereka yang berprofesi sebagai petani dan tergabung dalam komunitas tani di suatu wilayah, sehingga ada ungkapan bahwa secara umum kehidupan masyarakat tani memang sangat miskin dan rentan terhadap gejolak sekecil apapun yang menimpa mereka. Sebagian besar petani kita merupakan buruh tani dan petani gurem, mereka bercocok tanam hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan sebagian besar tidak mampu mencukupi kebutuhan tersebut. Meskipun demikian, pertanian adalah hal yang sangat penting, sebab pertanian merupakan salah satu sektor dari seluruh perekonomian.

Sifat utama masyarakat desa menurut pandangan umum atau pendapat-pendapat masyarakat pada umumnya bila melihat masyarakat desa bahwa masyarakat tersebut dekat antara perhubungan baik didaerah-daerah desa yang lain selalu dalam kehidupannya berubah

dan mudah terpengaruh disebabkan dekat daerah-daerah yang antar hubungan. kota dan daerah juga lainnya maka dapat menilai bagaimana segi kehidupan yang nyata dan menurut kaidah-kaidah atau hukumnya merupakan persyaratan yang baik. Hubungan antara manusia dengan manusia dan pembentukan pendapat umum dalam lingkungan golongangolongan manusia tidak kehilangan artinya semula, disampingnya kita melihat terjadinya pendapat umum yang jauh lebih baik artinya. Dalam susunan demokrasi modern pembentukan pendapat umum itu untuk sebagian besar, berdasarkan penerangan modern dan bebas pada pemerintah dikatakan penerangan ini bersifat propaganda. (Angkasawati 2015).

2.2.4 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan atau dalam bahasa Inggris disebut dengan empowerment merupakan sebuah konsep yang muncul pada akhir tahun 70-an di daerah Eropa dan terus berkembang hingga saat ini. Ife menyebutkan bahwa pada awal mulanya, konsep pemberdayaan mengacu kepada sebuah upaya pemberian wewenang, tanggung jawab dan kepercayaan kepada setiap individu masyarakat agar dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik (Ife, 2020).

Berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Ife, Chambers mendefinisikan pemberdayaan sebagai sebuah konsep yang digunakan dalam pembangunan ekonomi yang didalamnya juga mengandung nilai-nilai sosial. Pendapat ini kemudian berkembang pada pemaknaan yang lebih luas, dimana pemberdayaan bukan hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar atau mencegah kemiskinan, akan tetapi juga dilakukan untuk merencanakan masa depan yang lebih baik, sehingga stabilitas ekonomi dan sosial dapat berlangsung dengan berkelanjutan (Chambers, 2014).

Adapun Theresia menyebutkan bahwa konsep pemberdayaan dapat mendukung terciptanya kemandirian dalam masyarakat, baik secara sosial maupun secara ekonomi. Pemberdayaan masyarakat juga dapat dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup

bagi tiap-tiap individu masyarakat, serta meningkatkan kualitas lingkungan sekitar. Selanjutnya, Theresia juga mengkategorikan pemberdayaan masyarakat kedalam beberapa aspek, antara lain yaitu kegiatan peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan, serta kegiatan peningkatan kemampuan masyarakat (Theresia, 2015). Hurairah dalam Risky menyebutkan bahwa tujuan dari pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas kehidupan yang berdasarkan pada potensi atau kekuatan masyarakat itu sendiri (Pusut, Kimbal & Mamentu, M, 2017). Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Hurairah, Fahrudin juga menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan cara melakukan optimalisasi terhadap sumber daya dan potensi masyarakat. Selanjutnya, Sedarmayanti juga memaknai pemberdayaan masyarakat adalah bentuk upaya untuk menciptakan masyarakat yang mandiri (Fahrudin, 2012).

Nadhifa dalam tulisannya juga menyebutkan bahwa pemberdayaan yang baik adalah pemberdayaan yang berorientasi pada pengembangan potensi dan kapasitas sumberdaya manusia, sehingga individu masyarakat memiliki kemampuan untuk bertahan hidup dan mencukupi kebutuhannya, tanpa harus bergantung kepada orang lain secara terus menerus (Nadhifa, 2017).

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat juga sangat erat kaitannya dengan dilibatkannya masyarakat disemua tahapan program, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Seperti yang disampaikan oleh Usman, pemberdayaan masyarakat adalah salah satu prinsip yang berperan penting dalam suatu pembangunan. Dikatakan demikian, karena pemberdayaan masyarakat dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat disemua aspek pembangunan didalam masyarakat. Hal ini juga searah dengan apa yang dikemukakan oleh Wirutomo, bahwa tujuan utama dari pemberdayaan masyarakat tidak lain adalah untuk menumbuhkan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat terhadap pembangunan yang dilaksanakan. Pemberdayaan masyarakat pada umumnya juga

memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memperbaiki maupun meningkatkan kondisi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pada program pemberdayaan, masyarakat bukan hanya dilatih untuk meningkatkan kapasitas dirinya, akan tetapi juga dilatih agar dapat memanfaatkan potensi sumber daya yang ada disekitarnya, sehingga dapat bermanfaat ataupun memiliki nilai jual.

2.3 Kerangka Teori

Teori “ACTORS” dalam pemberdayaan masyarakat. Teori “ACTORS” tentang pemberdayaan yang dikemukakan oleh Sarah Cook dan Steve Macaulay lebih memandang masyarakat sebagai subjek yang dapat melakukan perubahan dengan cara membebaskan seseorang dari kendali yang kaku dan memberi orang tersebut kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-ide, keputusan-keputusannya, dan tindakan-tindakannya. Pemberdayaan yang dimaksudkan oleh Cook dan Macaulay lebih mengarah pada pendelegasian secara sosial dan etika/moral, antara lain: mendorong adanya ketabahan, mendelegasikan wewenang sosial, mengatur kinerja, mengembangkan organisasi (baik lokal maupun ekstern), menawarkan kerjasama, berkomunikasi secara efisien, mendorong adanya inovasi, dan menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. (Maani 2011)(Hadi 2015)

Kerangka kerja teori ini untuk pengkajian terkait pemberdayaan berbasis literasi *PanggonMoco* dalam “ACTORS” antara lain terdiri dari:

A = *authority* (wewenang). Yaitu kelompok/masyarakat diberikan kewenangan untuk merubah pendirian atau semangat (etos kerja) menjadi sesuatu yang menjadi sesuatu milik mereka sendiri. Dengan demikian, mereka merasa perubahan yang dilakukan adalah hasil produk dari keinginan mereka untuk menuju perubahan yang lebih baik. Dalam hal ini, yang memiliki wewenang dalam pengelolaan dan pemberdayaan berbasis literasi adalah *Panggon*

Moco sebagai lembaga pemerintahan non struktural tapi juga di support oleh Lembaga pemerintah. Kemudian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik memberikan wewenang kepada komunitas *PanggonMoco* untuk mengelola dan melakukan pemberdayaan yang telah diberikan kepada paramasyarakat yang SDMnyarendah.

C = *confidence and competence* (rasa percaya diri dan kemampuan). Yaitu menimbulkan rasa percaya diri kepada masyarakat yang tertinggal dengan melihat kemampuan mereka untuk dapat merubah keadaan.

T = *trust* (keyakinan). Yaitu menimbulkan keyakinan bahwa mereka (masyarakat yang SDMnyarendah) mempunyai potensi untuk merubah dan mereka harus bisa (mampu) untuk merubahnya.

O = *opportunities* (kesempatan). Yaitu Pemerintah Desa dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik memberikan kesempatan pada masyarakat untuk memilih apa yang menjadi keinginannya sehingga mereka dapat mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang ada dalam diri masyarakat itu sendiri.

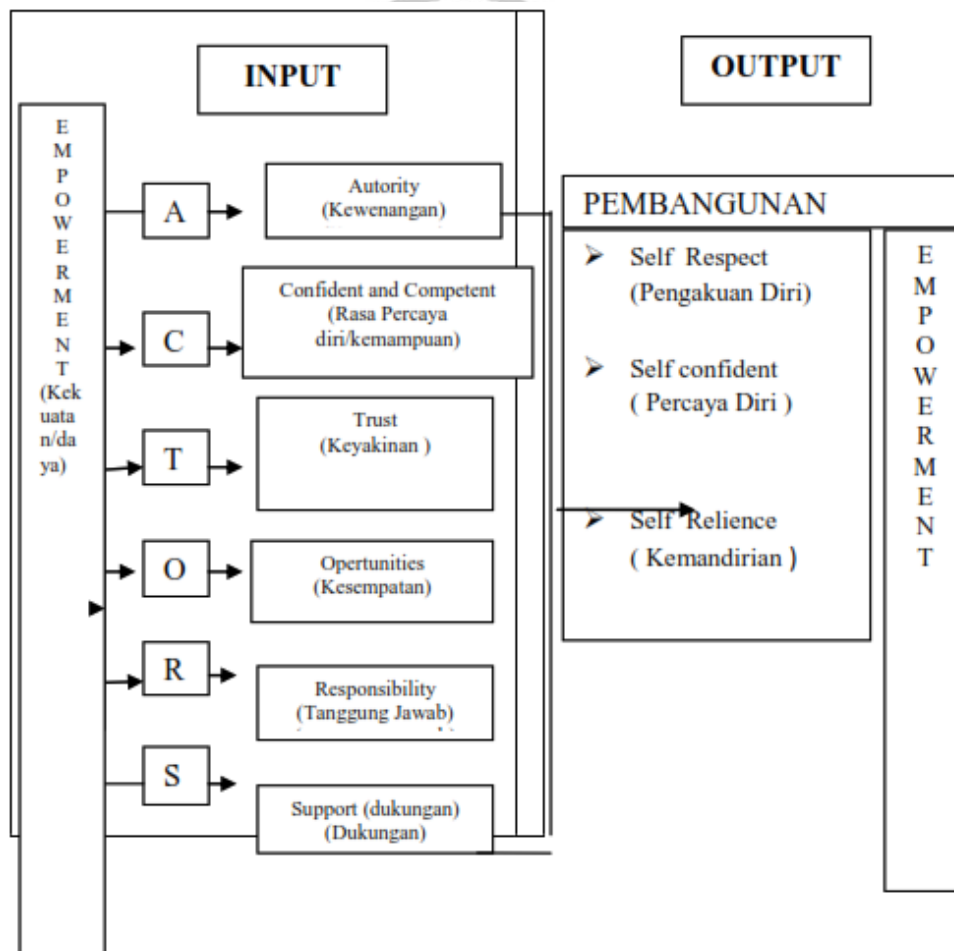
R = *responsibilities* (tanggung jawab). Pertanggung jawaban oleh Pemerintah desa dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik dan *PanggonMoco* harus melalui pengelolaan sehingga dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk berubah menjadi lebih baik.

S = *support* (dukungan). Yaitu perlu adanya dukungan pemerintah desa dan dari sisi ekonomis, sosial dan budaya juga dukungan dari berbagai stakeholders (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) yang dilakukan secara simultan tanpa didominasi oleh salah satu pihak/faktor.

Dengan menggunakan kerangka kerja “ACTORS” tersebut guna menumbuhkan keberdayaan masyarakat khususnya para kelompok disabilitas berbasis budaya, akan dapat

dilakukan dengan mengacu pada pemberdayaan yang berasal dari inner dan inter masyarakat. Dimana pemerintah dan organisasi non pemerintah sebagai aktornya.

Kerangka kerja teori ACTORS



Gambar 2.1 Kerangka Teori